

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Lokus Penelitian**

Desa Bongas merupakan salah satu Desa dari 8 ( delapan ) desa yang berada di wilayah Kcamatan Pamanukan,yang sebagian wilayahnya daerah pertanian. Berdasarkan dari data yang diperoleh dari kantor Desan Bongas mempunyai jumlah penduduk sebanyak 6.116 Jiwa. Dengan jumlah rumah tangga 2.200 KK.dan pemukiman dengan luas 299,050 Ha.Untuk gambaran umum dapat digambarkan sebagai berikut.

##### **A. Geografis Desa**

Desa Bongas secara geografis terletak disebelah utara kabupaten Subang dengan sebutan Desa Pantura dan secara administrative Desa Bongas berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Desa Rancahilir kecamatan Pamanukan
- Sebeleh selatan : Desa Rancaudik kecamtan Tambak Dahan
- Sebelah timur : Desa Bojong Tengah kecamata Pusaka Negara
- Sebelah barat : Desa Rancasari kecamatan Pamanukan

Desa Bongas berdasarkan Tipologinya berupa Persawahan dan termasukdalam Golongan Desa Swakarya (Sedang berkembang) dilihat dari kepadatan Penduduk, Jumlah Dana bantuan serta karakteristik Penduduk Desa Bongas.

##### **B. Visi Misi**

Adapun Visi Misi Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang sebagai berikut.

Visi :

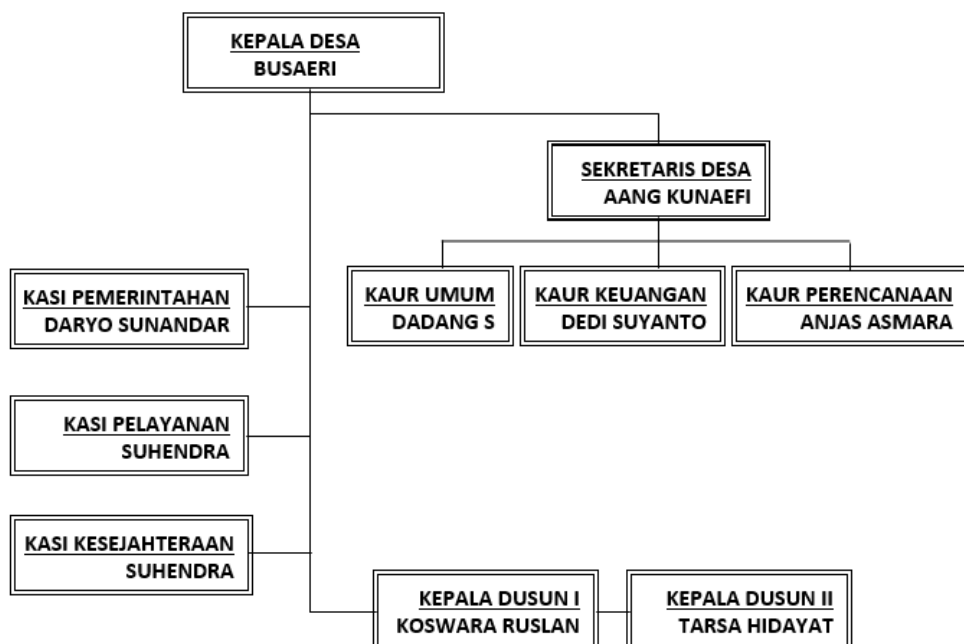
“ Mewujudkan Desa Bongas yang "Tawadhu" (Tertib, Aman, Wibawa, Asri, Dinamis, Harmonis dan Unggul)”

Misi :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermoral
2. Meningkatkan pola keritran dan eterpaduen antar petakus Pembangunan
3. Meningkatkan Pengentasan Kemiskinan
4. Meningkatkan pelestarian adat istiadat yang ada di Desa Bongas

#### b. Struktur Organisasi Desa

**Gambar 4.1 Struktur Desa Organisasi**



Sumber : Perangkat Desa

## **4.2 Hasil Penelitian**

Pembahasan apa yang diperoleh selama pengumpulan data dianalisis dari hasil penelitian berupa fakta dan data yang sudah di dapatkan saat berada di lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif serta pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi, menggunakan teori van Metter dan van Horn, hasil penelitian ini disajikan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang telah ditentukan.

### **4.2.1 Implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Subang**

Program keluarga harapan (PKH) mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 2007. Program ini merupakan produk kebijakan untuk menanggulangi permasalahan sosial milik Kementerian Sosial. Pada tahun pertama penerapannya, daerah-daerah yang menjadi tempat percontohan yaitu DKI Jakarta, Jawa timur, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan juga Gorontalo. Secara umum pelaksanaan Program Keluarga Hatapan (PKH) telah berjalan di Kabupaten Subang, khususnya di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, Namun demikian pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Hatapan (PKH) di Desa Bongas masih belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal tersebut dapat diketahui melalui berbagai fenomena yang penulis temukan selama melaksanakan penelitian.

Program keluarga harapan (PKH) yang merupakan program dari Pemerintah melalui Kementerian Sosial diharapkan dapat berjalan dengan baik dari waktu ke waktu sehingga masalah kemiskinan semakin bisa diminimalisir. Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Subang belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, seperti dikutip dalam wawancara dengan Informan 1 (satu) sebagai berikut.

“ indikator keberhasilan dalam pelaksanaan PKH adalah graduasi mandiri, untuk sekarang angka dari penerima bantuan 73.000 KPM dan yang keluar dari program sekitar 3000 mengartikan bahwa kurang dari 6%, sehingga jika mengarah kesitu penerapannya belum optimal” **(Informan 1 (satu) Sebagai KASI Jaminan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Subang, pada 21 Juli 2022, pukul 13.00 WIB)”**

Dalam hal ini, Program Keluarga Harapan di Kabupaten Subang belum berjalan optimal karena masih rendahnya angka graduasi mandiri KPM PKH di Kabupaten Subang.

Dalam pelaksanaan Implementasi program keluarga harapan di Kabupaten Subang dana anggaran berasal dari APBN dan APBD. seperti wawancara dengan informan 1 (satu) sebagai berikut.

“ sumber dana yang diberikan kepada KPM ya berasal dari APBN, setiap satu tahap itu rata-rata 40 Milliar kalau di Kabupaten Subang, dengan asumsi rata-rata sekitar 70.000 KPM itu nominal yang diberikan sekitar 40 Milliar, selain itu ada dukungan dari pemerintah daerah berupa insentif sebesar 5% untuk pelaksanaan PKH” **(Informan 1 (satu) Sebagai KASI Jaminan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Subang, pada 21 Juli 2022, pukul 13.00 WIB)”**

**Tabel 4.1 Data Anggaran PKH Kabupaten Subang 2019-2022**

KABUPATEN	TAHUN	TAHAP	KPM	NOMINAL
SUBANG	2019	TAHAP 1	72.910	Rp 44.636.525.000,00
SUBANG	2019	TAHAP 2	72.143	Rp 44.627.000.000,00
SUBANG	2019	TAHAP 3	71.589	Rp 49.274.575.000,00
SUBANG	2019	TAHAP 4	70.161	Rp 35.393.950.000,00
SUBANG	2020	TAHAP 1	64.853	Rp 43.033.750.000,00
SUBANG	2020	TAHAP 2	65.462	Rp 42.855.100.000,00
SUBANG	2020	TAHAP 3	67.972	Rp 43.839.112.000,00
SUBANG	2020	TAHAP 4	65.943	Rp 43.157.150.000,00
SUBANG	2021	TAHAP 1	62.002	Rp 38.669.325.000,00
SUBANG	2021	TAHAP 2	56.753	Rp 36.458.475.000,00
SUBANG	2021	TAHAP 3	60.242	Rp 35.850.200.000,00
SUBANG	2021	TAHAP 4	59.217	Rp 36.588.675.000,00
SUBANG	2022	TAHAP 1	73.991	Rp 47.231.700.000,00

**Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Subang**

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa dana anggaran Program Keluarga Harapan di Kabupaten Subang bahwa dalam implementasi PKH yang diberikan kepada KPM semua berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dalam pendistribusian dibagi menjadi 4 (empat) tahapan dalam satu tahun, pada Kabupaten Subang anggaran untuk PKH rata-rata 40 Miliar dengan asumsi rata-rata penerima bantuan sekitar 70.000 KPM. anggaran Dana yang berasal dari APBN meliputi dana bantuan sosial untuk KPM dan dana operasional untuk SDM PKH, untuk anggaran sendiri kedua kegiatan tersebut masih tercukupi. Selain dana dari APBN terdapat juga bantuan berupa insentif untuk para pendamping dalam pelaksanaan PKH yang berasal dari APBD.

Pendistribusian dana yang dilaksanakan dalam program keluarga harapan di Kabupaten Subang dilakukan oleh pendamping PKH, seperti wawancara dengan informan 4 (empat) sebagai berikut.

“ itu pendamping komunikasi ke RT kemudian para KPM dikumpulkan untuk pembagian buku rekening, KPM diverifikasi kemudian untuk KPM baru maka akan dibantu dalam pembukaan rekening kolektif, kalau untuk pendistribusian gaada masalah sih”  
**(Informan 4 (empat) Sebagai Pendamping PKH, pada 21 Juli 2022, pukul 10.00 WIB)**

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa pendistribusian tidak ada masalah dan telah dilakukan oleh pendamping PKH langsung yang dimana para KPM dikumpulkan dan diberikan rekening namun jika terdapat KPM baru maka akan dibantu dalam pembukaan rekening kolektif.

Para pendamping PKH sendiri ini ditetapkan oleh KEMENSOS yang dimana para pendamping mengikuti rekrutmen untuk menjadi pendamping PKH, seperti wawancara dengan informan 1 (satu) sebagai berikut.

“untuk menjadi pendamping PKH sendiri, rekrutmen yang dilaksanakan seperti yang ikut PNS saja, ada seleksinya, jadi memang ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi

**SDM PKH , dan pemberitahuannya melalui website Kemensos jika memang ada rekrutmen” (Informan 1 (satu) Sebagai KASI Jaminan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Subang, pada 21 Juli 2022, pukul 13.00 WIB)”**

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa para pendamping PKH telah mengikuti rekrutmen yang diadakan oleh Kementerian Sosial untuk menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH), dan pendamping PKH di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang telah lulus kualifikasi untuk menjadi pendamping PKH.

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) ini bertujuan keluarga miskin diharapkan membantuan dalam mengurangi beban pengeluaran KPM PKH, kondisi ekonomi di Kabupaten Subang dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) menurut informan 1 (satu) sebagai berikut.

“ kalau lihat dari data, kan yang termasuk di DTKS satu subang itu sekitar 500.000 ribuan, jadi kalau secara ekonomi dan berdasarkan 3 kultur tadi mau gamau kita harus melihat secara geografis di utara,tengah, dan selatan. Tapi dari pemenuhan kebutuhan sih udah oke, kalau misalkan kita membicarakan PKH dari 73.000 apakah masih ada ga yang kekurangan makannya? Mungkin ya ada saja. Tapi kalau dari angka keberhasilan, kondisi ekonomi subang gimanasih? kalau saya subjektifnya melihat ekonomi dengan adanya program ini sudah mulai oke gitu dan kalau diliat dari gimana cara keluarga atau orang memenuhi kebutuhannya so far sih oke, walaupun pandemi ya tapi lumayan”  
**(Informan 1 (satu) Sebagai KASI Jaminan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Subang, pada 21 Juli 2022, pukul 13.00 WIB)”**

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 2 (dua) dimana menanggapi kondisi ekonomi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang sebagai berikut.

“dengan adanya program ini tingkat perekonomian terbantu, kalau untuk meningkat mah kan mereka bukan buat modal ya, rata-rata untuk kebutuhan sehari-hari aja” **(Informan 2 (dua) Sebagai KASI Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pamanukan, pada 20 Juli 2022, pukul 10.00 WIB)**

Dalam hal ini dapat dilihat berdasarkan wawancara dengan informan 1 (satu) bahwa dengan adanya PKH masyarakat terbantu secara perekonomian masyarakat dengan adanya program PKH karena sejauh ini perekonomian membaik di Kabupaten Subang. informan 2 (dua) juga mengatakan bahwa meskipun tidak terlalu meningkatkan tetapi dengan adanya PKH tingkat perekonomian masyarakat terbantu.

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) ini bertujuan keluarga miskin diharapkan memiliki akses dan dapat memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan dan Pendidikan. Kondisi kesehatan di Kabupaten Subang dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) menurut informan 1 (satu) sebagai berikut.

“kondisi kesehatannya sangat bagus, ini menjadi indikator keberhasilan kita lah, atau ibu hamil yang meninggal ketika hamil udah gaada di PKH, Atau ada yang anaknya stunting juga minim, mungkin ada tapi 0 sekian persen paling, karena sepanjang sampai saat ini belum ada laporan yang masih besar” **(Informan 1 (satu) Sebagai KASI Jaminan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Subang, pada 21 Juli 2022, pukul 13.00 WIB)**

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa kondisi kesehatan di Kabupaten Subang sudah membaik dengan adanya PKH, dilihat dari ibu hamil yang merupakan KPM PKH sudah tidak ada lagi, kemudian stunting juga sudah minim, sampai sejauh ini belum ada laporan yang mengatakan masih besar.

Selain kesehatan, Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) ini juga diharapkan masyarakat dapat mengakses pendidikan di Kabupaten Subang dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) menurut informan 1 (satu) sebagai berikut.

**“kondisi pendidikan bagus, angka anak putus sekolah sudah minim, walaupun ya ada aja” (Informan 1 (satu) Sebagai KASI Jaminan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Subang, pada 21 Juli 2022, pukul 13.00 WIB)”**

Jadi dalam hal ini bahwa tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Subang tentang meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi anak sudah baik meskipun masih terdapat angka anak putus sekolah tetapi dalam hal ini dapat dikatakan sudah minim.

Dalam implementasi program keluarga harapan di Kabupaten Subang tidak lepas dari berbagai hambatan. Hambatan utama dalam penerapan PKH di Kabupaten Subang ini adalah berkaitan kondisi masyarakat, seperti wawancara dengan informan 1 (satu) sebagai berikut.

**“kalau hambatan kita anggap tantangan, 73.000 KPM dengan sekitar 200 pendamping sosial, kalau diambil rasio yang ideal satu pendamping harusnya mendampingi sekitar 250 KPM, tetapi di beberapa tempat ada yang lebih ada yang kurang, sehingga kadang kala penyampaian informasi yang diberikan pendamping mengalami sedikit kendala seperti waktu, kemudian pendampingnya juga tidak semuanya berdomisili ditempat dampingan mereka, sehingga geografis masih menjadi kendala, kemudian fasilitas juga di beberapa tempat ternyata subang masih ada beberapa yang blankspot, dan kendala-kendala yang bersifat teknis sih itu. Kita tidak menyalahkan juga tetapi berakibat juga pandemi selama dua tahun, baru 9 KPM yang mau keluar dari program, jadi kalau dibilang kendala semua hal pasti ada sumbangsuhnya, tapi memang kita anggap itu sebuah tantangan kedepannya” (Informan 1 (satu) Sebagai KASI Jaminan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Subang, pada 21 Juli 2022, pukul 13.00 WIB)”**



Dapat dilihat berdasarkan pernyataan informan 1 (satu) menyatakan bahwa di Kabupaten Subang permasalahan yang terjadi adalah karena tidak tersebarunya jumlah SDM yang merata sehingga terjadi keterbatasan komunikasi di beberapa tempat kemudian jarak pendamping yang tidak selalu berdomisili di desa dampungannya, dan ada kendala-kendala yang bersifat teknis.

## **4.2.2 Implementasi PKH di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang Berdasarkan Indikator**

### **4.2.2.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Menurut Van Metter dan Van Horn (2019:142) suatu kinerja implementasi kebijakan dengan menuai berhasil atau tidak suatu kebijakan dapat dilihat pada ukuran kebijakan dan tujuan kebijakann dan bagaimana kebijakan ini di lakukan di level masyarakat kalau tidak tersampaikan dengan baik memang sulit untuk dikatakan berhasil. Implementasi Kebijakan yang dimaksud adalah Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, Informasi ini tentunya didapatkan dari hasil wawancara dengan 10 informan dimana empat diantaranya adalah para pelaksana yang menjadi implementor Program Keluarga Harapan (PKH), dan enam keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima bantuan Program keluarga Harapan (PKH) .

Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, PKH ini dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2007. Pada pelaksanaan PKH dengan mencapai tujuan sebagaimana dapat dilihat dari wawancara kepada informan 1 (satu) yaitu sebagai berikut:

“ tujuan PKH ini untuk percepatan penanggulangan kemiskinan yang dimana sasarannya adalah keluarga miskin. Dimana para masyarakat diberikan bantuan, biasanya yang menerima PKH mendapatkan bantuan lainnya seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan sebagainya, sehingga ketika masyarakat telah selesai dengan permasalahan sekolah anak dll harusnya dapat mandiri untuk menghidupi kehidupannya, syarat dari bantuan ini memang tidak mengenal seumur hidup,

berbatas waktu. Dan memang tujuannya mengubah pola perilaku”  
**(Informan 1 (satu) Sebagai KASI Jaminan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Subang, pada 21 Juli 2022, pukul 13.00 WIB)**

Dalam melakukan program agar tercapainya Program Keluarga Harapan ini pastinya mengalami hambatan sebagaimana yang dijelaskan oleh informan 2 (dua) informan 3 (tiga), dan informan 4 (empat), menanggapi hambatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang sebagai berikut:

“hambatan pasti ada, kalau dikatakan berhasil atau tidaknya, tidak mungkin 100% berhasil, apapun programnya tidak mungkin, itu kan datanya sesuai yang sudah berjalan penerimanya, kadang-kadang data tersebut masyarakat itu zonk data tersebut, ada namanya tetapi mereka istilahnya udah beberapa bulan tidak mendapatkan, ada banyak yang seperti itu, kebanyakan yang saya amati kebanyakan seperti itu, namanya kan juga belum 100% ya, yang begitu aja, karena data yang masuk kesana juga mungkin kan bertahap, turunnya bertahap” **(Informan 2 (dua) Sebagai KASI Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pamanukan, pada 20 Juli 2022, pukul 10.00 WIB)**

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 3 (tiga) dimana menanggapi terkait hambatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang sebagai berikut:

“ hambatannya seringkali sasarannya belum berhasil di desa hampir sekitar 1.055 KK masyarakat kategori keluarga miskin, tetapi yang menerima sekarang kurang dari 200” **(Informan 3 (tiga) Sebagai KASI Kesejahteraan Desa Bongas, pada 26 Juli 2022, pukul 10.00 WIB)**

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 4 (empat) dimana menanggapi terkait hambatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang sebagai berikut:

“kalau melihat sasaran kan artinya penentuan KPM berarti ya sasarannya, belum semua masyarakat menerima bantuan, seringkali NIK tidak sinkron ” **(Informan 4 (empat) Sebagai Pendamping PKH, pada 21 Juli 2022, pukul 10.00 WIB)**

Dari penjelasan menurut informan 1 (satu) bahwa PKH ini bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, masyarakat diharapkan dapat memiliki akses untuk Pendidikan dan kesehatan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan, menurut informan 2 ( dua) diatas menyatakan juga bahwa tujuan dari kebijakan ini pelaksanaannya belum 100% masih terdapat masyarakat di Kecamatan Pamanukan yang belum menerima bantuannya,.informan 3 ( tiga) diatas menyatakan bahwa hambatan PKH belum berhasil karena sasaran dalam implementasi kebijakan ini belum terlaksana secara menyeluruh. dan informan 4 (empat) diatas menyatakan juga bahwa pelaksanaan di Desa Bongas sering kali bermasalah karna Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak sesuai.

Mendukung pernyataan tersebut menurut hasil observasi di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten pada pelaksanaan PKH masih banyak terdapat kendala dimana KPM tidak menerima bantuan dan pencairannya mengalami keterlambatan. Dan menurut hasil observasi bahwa adanya hambatan tersebut dikarenakan dalam implementasinya, masih terdapat beberapa kendala yang dirasakan di lapangan sehingga tidak berjalan dengan maksimal, hambatan Program Keluarga Harapan (PKH) ini belum sepenuhnya mencapai sasaran karena terkendala pada masyarakat, dimana banyak masyarakat belum memperbaiki administrasi kependudukan, sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat menerima bantuan.

**Gambar 4.2 Masalah Adminsitration Kependudukan**

3213115512780003		PROGRAM KELUARGA HARAPAN	Jun 27 2022 11:51:38: 120AM	3213113107860003	Juni 2022	TIDAK VALID	NIK TIDAK DITEMUKAN DI CAPIL	TIDAK DISAHKAN
3213111803130008		PROGRAM KELUARGA HARAPAN	Jun 27 2022 11:51:38: 120AM	3213113107860003	Juni 2022	TIDAK VALID	NIK TIDAK DITEMUKAN DI CAPIL	TIDAK DISAHKAN

**Sumber : Perangkat Desa**

Terkait mewujudkan indikator keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial mempunyai program untuk mencapai tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara kepada informan 1 (satu) sebagai berikut.

“ kita dari dinas sosial mengadakan pembinaan langsung ke lapangan, menguatkan kembali kepada KPM bahwa PKH itu program bersyarat yang ada batasan waktunya. Apabila KPM merasa sudah mapan bisa keluar dari program PKH, kemudian pembinaan juga ke pendamping seperti mengingatkan tugas pokok dan fungsi, dan juga kode etik” **(Informan 1 (satu) Sebagai KASI Jaminan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Subang, pada 21 Juli 2022, pukul 13.00 WIB)**

Dari penjelasan menurut informan 1 (satu) menyatakan bahwa Dinas Sosial untuk mencapai tujuan program dengan turun langsung lapangan seperti pembinaan kepada KPM dan juga SDM PKH atau pendamping PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH) suatu usaha dalam penanggulangan kemiskinan, tetapi suatu kebijakan tidak dikatakan berhasil apabila tidak tersampaikan kepada masyarakat secara menyeluruh sebagaimana yang dijelaskan oleh informan 3 (satu) yaitu sebagai berikut :

“ karena program ini berjalan sudah lama, masyarakat sudah mengetahui program bantuan PKH sendiri” **(Informan 3 (tiga) Sebagai KASI Kesejahteraan Desa Bongas, pada 26 Juli 2022, pukul 10.00 WIB)**

Selanjutnya hal yang sama disampaikan oleh informan 4 (empat) mengenai pengetahuan tentang Program Keluarga Harapan di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang berikut hasilnya:

“ kalau dulu-dulu awal ada program PKH iya harus menyampaikan ke semua masyarakat, kalau sekarang masyarakat sudah tau” **(Informan 4 (empat) Sebagai Pendamping PKH, pada 21 Juli 2022, pukul 10.00 WIB)**

Sesuai penjelasan diatas terkait pengetahuan masyarakat tentang PKH di Desa Bongas di awal adanya program PKH sudah disosialisasikan dan sekarang sudah menyeluruh sampai dengan masyarakat, masyarakat sudah mengetahui tentang program bantuan PKH.

#### **4.2.2.2 Sumber Daya**

Menurut van metter Van horn (2019:142) implementasi kebijakan dikatakan berhasil apabila dapat memanfaatkan sumber daya dengann baik sesuai dengan keberhasilan proses implementasi untuk menjalankan kebijakan menuntut harus mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas di dalam suatu bisang kebijakan tersebut. Tidak hanya sumber daya manusia, seperti sumber daya finansial yang mencukupi untuk melaksanakan program dari kebijakan tersebut lalu adanya sumber daya waktu yang menjadi faktor penentu dalam ukuran waktu untuk target para agen pelaksana. Dengan adanya sumberdaya yang berkesinambungan dan memadai suatu kebijakan akan bisa dikatakan berhasil.

Terakit pencapaian Program Keluarga Harapan butuh waktu untuk mencapai hal itu, hasil wawancara dengan informan 1 (satu) terkait sumber daya waktu yaitu sebagai berikut :

**“ Target waktu ada kalau keberhasilan jangka pendek ada itu cuma misalkan taget penyaluran bantuan tapi kalo untuk graduasi mandiri sendiri tidak ada” (Informan 1 (satu) Sebagai KASI Jaminan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Subang, pada 21 Juli 2022, pukul 13.00 WIB)**

Dari penjelasan mengenai sumber daya waktu dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, terkait sumber daya waktu yang dijelaskan oleh informan 1 bahwa target waktu jangka pendek seperti penyaluran bantuan tetapi untuk graduasi mandiri KPM PKH tidak ada target.

Selanjutnya tanpa adanya unsur sumber daya finansial ya memadai implementasi tidak akan berjalan dengan baik, berikut hasil wawancara dengan informan 4 ( empat) yaitu sebagai berikut:

“dana itu bersumber dari APBN dan APBD, selama ini jumlah anggaran menyesuaikan dengan jumlah penerima bantuan PKH di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan ini, untuk APBD sendiri itu hanya untuk pendamping berupa pemberian insentif” **(Informan 4 (empat) Sebagai Pendamping PKH, pada 21 Juli 2022, pukul 10.00 WIB)**

#### 4.2 Data Anggaran PKH di Desa Bongas 2021-2022

DESA	KPM	NOMINAL	TAHAP
BONGAS	330	212.600.000	TAHAP 1 2021
BONGAS	246	161.500.000	TAHAP 2 2021
BONGAS	272	158.900.000	TAHAP 3 2021
BONGAS	263	160.925.000	TAHAP 4 2021
BONGAS	197	133.625.000	TAHAP 1 2022

**Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Subang Tahun 2022**

Jika telah tersedianya sumber daya finansial, kebijakan ini tidak dapat berjalan tanpa adanya sumber daya manusia yang mumpuni untuk menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH), berikut hasil wawancara dengan informan 1 ( satu), 2 ( dua), 3 ( tiga), 4 ( empat) dan 5 (lima) sebagai berikut:

“ kalau misalkan sekarang disesuaikan dengan jumlah KPM masing-masing dikecamatan, kalau kita simpulkan dengan satu kabupaten sekitar 200 SDM PKH, itu cukup bahkan banyak, tetapi apabila kita mengerucut sampai dengan desa, itu relatif” **(Informan 1 (satu) Sebagai KASI Jaminan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Subang, pada 21 Juli 2022, pukul 13.00 WIB)”**

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 2 ( dua) dimana menanggapi terkait terkait sumber daya manusia pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai berikut:

“kalau SDM kan keterbatasannya kan sesuai dengan jumlah KPM, ada KPM disuatu desa banyak pendampingnya bisa 3 bisa 2 bisa 1, tergantung jumlah penduduk yang mendapatkan manfaat tersebut, dilihat dari jumlah KPM-nya” **(Informan 2 (dua) Sebagai KASI Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pamanukan, pada 20 Juli 2022, pukul 10.00 WIB)**

**Tabel 4.3 Jumlah Pendamping PKH Kecamatan Pamanukan**

Jumlah Pendamping PKH di Kecamatan Pamanukan	
Desa Mulyasari	3 Pendamping
Desa Pamanukan	3 Pendamping
Desa Lengkongjaya	3 Pendamping
Desa Pamanukan Sebrang	2 Pendamping
Desa Pamanukan Hilir	2 Pendamping
Desa Rancasari	2 Pendamping
Desa Bongas	1 Pendamping
Desa Rancahilir	1 Pendamping

**Sumber : Perangkat Kecamatan Pamanukan Tahun 2022**

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 3 ( tiga) dan informan 4 ( empat) dimana menanggapi terkait terkait sumber daya manusia pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, Informan 3 ( tiga) menyatakan bahwa untuk melakukan pendataan sumber daya manusia di desa sudah cukup. Informan 4 ( empat) menyatakan bahwa dengan satu pendamping cukup karna KPM di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang sedikit.

Dari penjelasan menurut informan terkait sumber daya anggaran yang dijelaskan oleh informan 1 ( satu) bersumber dari dana APBN di Kabupaten Subang sebesar Rp. 40 Milliar dalam pendistribusian satu tahap untuk sekitar 70.000 KPM di Kabupaten Subang. Lalu terkait sumber daya manusianya bersifat realtif, sekitar

200 SDM PKH dapat dikatakan sudah cukup menjalankan kebijakan PKH, tetapi dalam implementasinya penyebar SDM untuk mendampingi desa-desa belum terealisasi secara merata, dalam satu desa ada yang kekurangan pendamping dan ada yang kelebihan pendamping. Informan 2 (dua) menyatakan untuk sumber daya sesuai dengan jumlah KPM.

#### 4.2.2.3 Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

Menurut Van metter dan Van horn (2019:142) dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus ada peran dari organisasi formal dan informal karena memang suatu kebijakan sangat berpengaruh terhadap ciri-ciri para pelaksana dengan meluaskan keterlibatan ini maka semakin besar pelaksana yang dilibatkan.

Terkait kesesuaian luas cakupan agen pelaksana atau implementor dari Program Keluarga Harapan Menurut hasil wawancara dengan informan 1 (satu) menyatakan bahwa bersifat relatif, SDM PKH sudah cukup dalam pelaksanaannya tetapi dalam pembagiannya belum merata. Mendukung pernyataan Informan 1 (satu) menurut hasil wawancara dengan Informan 4 (empat) menyatakan bahwa implementasi PKH di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang dengan satu pendamping cukup sesuai dengan cakupan.

Terkait strategi komunikasi agen pelaksana atau implementor dari Program Keluarga Harapan Menurut hasil wawancara dengan informan 2 (dua) sebagai berikut :

“jadi justru itu dari PKH itu ke desa, pendampingnya itu. Kami mah hanya menerima misalnya tanggal sekian ada pembagian ini, ditsubusi ini, gitu. Jadi untuk pendataan pendamping, kan dari dinas sosial, kemensos langsung ke beliau-beliau gitu, yang ada dilapanganlah istilahnya, sosialisasi juga biasanya mereka yang terjun langsung ke desa nanti RTnya yang memberikan tau kepada masyarakat akan turun tanggal sekian, kecamatan tidak menggelar sosialisasi, itu di desanya masing-masing” **(Informan 2 (dua) Sebagai KASI Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pamanukan, pada 20 Juli 2022, pukul 10.00 WIB)**



Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 3 ( tiga) dimana menanggapi terkait strategi komunikasi agen pelaksana dalam implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai berikut:

“kalau komunikasi semacam sosialisasi tidak ada, itu pendamping PKH kalau pendamping minta sosialisasi ya kita turun kalau tidak ya tidak, desa itu hanya mendata yang dilapangan itu langsung pembimbing-pembimbingnya aja”  
**Informan 3 ( tiga) Sebagai KASI Kesejahteraan Desa Bongas, pada 26 Juli 2022, pukul 10.00 WIB)**

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 4 (empat) dimana menanggapi terkait strategi komunikasi agen pelaksana dalam implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai berikut:

“kalau di PKH itu ada sosialisasi tiap bulannya, itu namanya pertemuan kelompok harus berjalan seperti itu, jadi infonya dari situ aja, kan roh dari PKH itu edukasinya merubah pola pikir, jadi intinya ada pertemuan-pertemuan itu memang untuk itu”  
**(Informan 4 (empat) Sebagai Pendamping PKH, pada 21 Juli 2022, pukul 10.00 WIB)**

Hal yang berbeda disampaikan dari sisi informan 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) terkait sosialisasi di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, menurut hasil wawancara menyatakan secara keseluruhan bahwa sosialisasi tidak dilaksanakan tiap bulan, sekitar 3 bulan sekali jika ada pendistribusian uang PKH. dan menurut hasil observasi sosialisasi ini sudah lama tidak berjalan dengan pendamping PKH di Desa Bongas.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa informan 2 ( dua) tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat, hal tersebut dilakukan oleh pendamping PKH di Desa, kemudian Informan 3 ( tiga) menyatakan bahwa komunikasi ke masyarakat desa tidak melakukan sosialisasi, hal tersebut dilakukan

oleh pendamping PKH, informan 4 ( empat) menyatakan bahwa komunikasi ke masyarakat dengan cara sosialisasi rutin setiap bulan.

#### **4.2.2.4 Kecenderungan Pelaksana**

Menurut van metter dan van horn (2019:142) penerimaan penolakan yang di tunjukkan dari sikap para pelaksana kebijakan menjadi faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan karena kebijakan disini dibuat atas dasar yang diketahui oleh para agen pelaksana tanpa melibatkan permasalahan sebenarnya oleh warga setempat hal ini bisa sangat terjadi.

Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan bantuan sosial yang berhubungan langsung dengan masyarakat, banyak stakeholder yang dilibatkan dalam pelaksanaannya Dalam hal ini pemerintah perlu melibatkan banyak pihak dalam upaya penanggulangan kemiskinan,lalu dengan ini ketiga stakeholder tersebut menanggapi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH), sebagaimana dapat dilihat dari wawancara kepada informan 2 (satu), informan3 (dua), informan4 ( tiga) yaitu sebagai berikut :

“bagus, mendukung masyarakat yang tidak mampu karena apalagi terdampak covid segala macem, udah masyarakat di desa kerjanya serabutan dengan adanya program tersebut sangat alhamdulillah mereka terbantu” **(Informan 2 (dua) Sebagai KASI Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pamanukan, pada 20 Juli 2022, pukul 10.00 WIB)**

Dari penjelasan menurut informan 2 ( dua) diatas menyatakan bahwa penerapan PKH ini sangat bagus karena merupakan program yang membantu masyarakat yang tidak mampu terlebih pada masa pandemi Covid-19, selanjutnya hasil wawancara dengan informan 3 (tiga) dimana menanggapi terkait kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) menurut informan 3 ( tiga) menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) ini bagus membantu masyarakat di Desa, lalu menurut informan 4 ( empat) menjelaskan bahwa kebijakan ini bagus membantu para KPM.

Program bantuan ini diperuntukan untuk masyarakat, pendamping PKH selaku implementor yang berhubungan langsung dengan masyarakat harus mengetahui apa yang diharapkan masyarakat karna pelaksanaan ini harus sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat penerima bantuan. berikut penjelasan mengenai kesesuaian keinginan masyarakat. menurut informan 4 ( empat) sebagai berikut :

“ya sudah sesuai, kaya dilihat dari KPM kan memang memberikan bantuan sesuai dengan apa yang harus dibantu, terus KPM juga benar-benar membutuhkan, mungkin itu salah satunya fungsi memverifikasi dan validasi kan disitu” **(Informan 4 (empat) Sebagai Pendamping PKH, pada 21 Juli 2022, pukul 10.00 WIB)**

Dari penjelasan menurut informan 4 ( empat) menyatakan bahwa pelaksanaan PKH ini sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, karena masyarakat menerima bantuan juga sesuai dengan komponen yang dibutuhkan masyarakat tersebut.

Penerimaan sikap didalam kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) ditunjukkan dengan membangun komitmen nasional, untuk Program Keluarga Harapan (PKH) ini bisa dikatakan prioritas atau tidak berikut hasil wawancara dengan informan 1 (satu) sebagai berikut :

“ seharusnya iya, tapi kalau menurut saya untuk menjadi prioritas sedangkan tadi masih banyak masyarakat yang belum tau informasinya, ya menurut saya belum jadi prioritas dan belum jadi pikiran banyak orang, pikiran banyak orang tuh beda lagi, yang pengen doang dapat bantuan memang banyak, tapi untuk mewujudkan tujuan yang tadi belum, jadi saya harus bilang belum” **(Informan 1 (satu) Sebagai KASI Jaminan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Subang, pada 21 Juli 2022, pukul 13.00 WIB)**

Terkait penjelasan diatas bahwa memang Program keluarga Harapan (PKH) ini menjadi kebijakan yang seharusnya di prioritaskan namun dalam pelaksanaannya belum, selain itu Dinas Sosial Kabupaten Subang juga merasa bahwa perlu program lanjutan untuk para KPM yang telah memutuskan untuk graduasi mandiri.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 1 (satu) dimana menanggapi terkait program lanjutan dalam Implementasi Program keluarga Harapan (PKH) sebagai berikut :

“kan goalsnya itu graduasi mandiri, kalau pertanyaannya setelah itu gimana apakah tidak dilibatkan lagi PKH? Ada, terakhir kali 2021 itu biasanya ada program lanjutannya, bagi mereka yang memutuskan keluar dari program ini, kita masih sadar mereka butuh bimbingan lagi, kalau kata saya gaterlalu percaya kalau mereka sudah mandiri, kan kejadian 2020 bulan february itukan di Indonesia belum terlalu hype covid, di daerah cipunagara ada sekitar 100 orang yang keluar graduasi mandiri dibulan february, nah pas covid, maret April mereka ingin balik lagi, kan daftarnya gampang itu kan, jadi banyak yang menyesal, jadi artinya kita sadar kalau memang mereka gacukup cuma sekedar keluar, jadi tugas pendamping itu disitu memastikan apakah misalkan 6 bulan kemudian masih bisa menghidupi keluarga ga, itu juga jadi pertimbangan lebih berhati-hati jadi tidak sekedar ngejar target graduasi mandiri harus tinggi, apalagi sekarang keadaannya seperti ini, udah kuat ga sih KPM memutuskan untuk keluar”  
**(Informan 1 (satu) Sebagai KASI Jaminan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Subang, pada 21 Juli 2022, pukul 13.00 WIB)**

Lalu bagaimana sikap jika dalam memprioritaskan kebijakan terdapat suatu kendala/hambatan berikut hasil wawancara dengan informan 3 (tiga), dan informan 4 (empat) :

“hambatan yang dirasakan itu aplikasi pendataan dengan sistem online yang sekarang karena banyak masyarakat yang KTP dan KK-nya belum online karena kesadaran masyarakat kurang, sehingga memaksimalkan agar masyarakat mengubah KTP dan KK untuk terdaftar pada DTKS” **(Informan 3 (tiga) Sebagai KASI Kesejahteraan Desa Bongas, pada 26 Juli 2022, pukul 10.00 WIB)**

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 4 (empat) dimana menanggapi terkait kendala/hambatan dalam Implementasi Program keluarga Harapan (PKH) sebagai berikut :

“hambatan yang biasa dirasakan adalah masyarakat tidak menerima bantuan sekarang karena sering NIK tidak padan,

administrasi kependudukannya bermasalah, upaya dalam hal itu pendamping menyarankan ke desa untuk adanya kolektif bagi masyarakat yang memang belum memperbaiki administrasi kependudukan, diharapkan dapat menimalisir kendala tersebut”  
**(Informan 4 (empat) Sebagai Pendamping PKH, pada 21 Juli 2022, pukul 10.00 WIB)**

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa para implementor Program Keluarga Harapan (PKH) ini cenderung mendukung kebijakan tersebut bahkan program Keluarga Harapan (PKH) ini harusnya dijadikan prioritas menurut informan 1 (satu), kemudian dalam pelaksanaan apabila terdapat hambatan para implementor informan 3 (tiga) menyatakan bahwa berusaha untuk meminimalisir hambatan tersebut. Dan informan 4 (empat) menyatakan bahwa hambatan tersebut merupakan tantangan.

#### **4.2.2.5 Komunikasi Antar Organisasi**

Menurut van metter dan van horn (2019:142) semakin baik koordinasi antara sesama pelaksana yang dilakukan maka akan semakin baik juga hasil dari kebijakan tersebut, masalah akan selalu terpecahkan jika memang koordinasi tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan rencana.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang mempunyai banyak implementor kebijakan tersebut, berikut hasil wawancara dengan inforan 1 (satu), 3 (tiga), dan 4 (empat) mengenai siapa saja stakeholder dalam implementasi kebijakan tersebut dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, menurut informan 1 (satu), dan 3 (tiga) dan 4 (empat) diatas menyatakan bahwa banyak yang terlibat dalam pelaksanaannya seperti sekolah, puskesmas, kecamatan, pendamping PKH.

Banyaknya stakeholder yang terlibat, dibutuhkan koordinasi yang berjalan dengan baik pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang. Berikut hasil wawancara mengenai koordinasi para stakeholder dalam implementasi kebijakan tersebut yaitu hasilnya :

“belum maksimal, karena sebaik-baiknya yang namanya interaksi sosial ada gesekan lah dikit, Kendalanya barangkali perlu lebih ditingkatkan lagi rasa kepemilikan program ini kesemuanya, jadi melepaskan label juga kalau eksklusif.” **(Informan 1 (satu) Sebagai KASI Jaminan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Subang, pada 21 Juli 2022, pukul 13.00 WIB)”**

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 3 (tiga) dimana menanggapi terkait koordinasi para stakeholder dalam implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai berikut:

“koordinasi dengan pendamping PKH sebatas pendataan masyarakat, tapi belum ketemu juga sih sama pendamping, cuma via wa, kalau sama RT untuk pendataan masyarakat melalui RT baik sih kalau itu” **(Informan 3 (tiga) Sebagai KASI Kesejahteraan Desa Bongas, pada 26 Juli 2022, pukul 10.00 WIB)**

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 4 (empat) dimana menanggapi terkait koordinasi para stakeholder dalam implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai berikut:

“alhamdulillah kalau kami kan artinya pertama sekali sekarang-sekarang dengan desa, khususnya dengan operator desa karna kaitannya dengan data, dengan operator sink-g, terus berjalan sampai sekarang” **(Informan 4 (empat) Sebagai Pendamping PKH, pada 21 Juli 2022, pukul 10.00 WIB)**

Menurut hasil observasi perangkat desa dengan pendamping koordinasi hanya sebatas dengan pendataan, perangkat desa dengan pendamping kurang berkoordinasi terkait pelaksanaan dilapangan, ketika pendamping tidak dapat melakukan sosialisasi, tidak berkoordinasi dengan perangkat desa untuk turun lapangan, dan perangkat desa sendiri kurang rasa kepemilikan program sehingga merasa yang perlu mengetahui kondisi sekarang ialah pendamping, sehingga dalam hal ini perangkat desa kurang kesadaran untuk turun lapangan, sedangkan PKH ini membutuhkan peran pendukung setiap stakeholder. Hal ini mendukung pernyataan

Dinas Sosial bahwa perlu ditingkatkan lagi rasa kepemilikan program para pelaksana.

Dari penjelasan mengenai koordinasi stakeholder dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, menurut informan 1 (satu) di atas menyatakan bahwa belum optimal, dimana seringkali merasa para pelaksana tersebut berfikir hal tersebut bukan lah tugasnya, seharusnya para pelaksana melepaskan label dan merasa bahwa hal tersebut adalah tugas bersama. Menurut informan 3 (tiga) menyatakan bahwa koordinasi hanya melakukan pendataan dengan pendamping dan ketua RT berjalan dengan baik, dan informan 4 (empat) di atas menyatakan bahwa koordinasi dengan desa baik khususnya operator desa yang sekarang memegang data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan dengan pihak kecamatan, puskesmas dan lain-lain berjalan dengan baik.

Penyampaian komunikasi dalam suatu implementasi kebijakan merupakan hal yang penting, ketika suatu kebijakan tidak dikomunikasikan dengan baik maka akan mempengaruhi pelaksanaan tersebut, sehingga dibutuhkan cara komunikasi yang baik antar stakeholder agar implementasi berjalan dengan baik. Menurut informan 1 (satu) cara komunikasi stakeholder dalam implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai berikut:

“karna kita tau ini program nasional, ya kita tunduk dan patuh terhadap itu, jadi kita sepanjang ada surat resmi jadi kita ikutin rulesnya, peran kita cuma sosialisasi, mensosialisasikan yang jadi kebijakan pusat dalam hal ini pada khalayaknya, seperti seluruh stakeholder, ke KPM, pendamping sosial, dan lain-lainnya”  
**(Informan 1 (satu) Sebagai KASI Jaminan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Subang, pada 21 Juli 2022, pukul 13.00 WIB)”**

Selain sosialisasi, dinas sosial Kabupaten Subang dalam pelaksanaan PKH melaksanakan rapat koordinasi rutin dalam implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan, Berikut hasil wawancara mengenai rapat koordinasi rutin antara para stakeholder dengan informan 1 (satu), yaitu sebagai berikut:

“ada, kalau yang rutin-rutin kitakan memang butuh evaluasi setiap saat, ditambah dengan hal-hal yang biasanya tugas-tugas tambahan itu biasanya dulu itu setiap Selasa ada apel pagi kita kumpulin beberapa kecamatan dibagi-bagi untuk sharing, seperti ada update apa, dan segala macam. Dan juga ada evaluasi bersama-sama setiap bulan dan akhir tahun” **(Informan 1 (satu) Sebagai KASI Jaminan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Subang, pada 21 Juli 2022, pukul 13.00 WIB)”**

Mendukung pernyataan informan 1 (satu) menyatakan bahwa rapat rutin dilaksanakan sebulan sekali. Berikut hasil wawancara dengan informan 4 (empat) menyatakan bahwa apel dilaksanakan rutin tiap bulan jika ada kondisi dan pengumuman akan diadakan rapat koordinasi mendadak.

Dari penjelasan mengenai rapat koordinasi rutin dalam implementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, menurut informan 1 (satu) di atas menyatakan bahwa rapat rutin dilaksanakan biasanya saat apel pagi tiap hari Selasa dengan membagi beberapa kecamatan untuk sharing atau evaluasi, kemudian juga ada evaluasi setiap bulan dan akhir tahun. Menurut hasil observasi mendukung pernyataan informan 1 (satu) dan 4 (empat) bahwa rapat rutin pada dua tahun terakhir pandemi Covid-19 tetap dilaksanakan dengan via zoom, atau ber tatap muka langsung dengan mengirimkan koordinator masing-masing kecamatan dengan proses yang ketat.

Dalam pelaksanaan implementasi dibutuhkan monitoring agar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di awal guna mencapai tujuan dan sasaran. Berikut hasil wawancara mengenai monitoring para stakeholder dalam implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan, yaitu hasilnya:

“yang melaksanakan monitoring itu PPKH. Monitoring PPKH sendiri dilaksanakan berupa pembinaan pendamping dan penerima bantuan, jadi segala kebijakan kan suatu saat ada perubahan, dan PPKH tugasnya disitu. Jadi turun lapangan apa aja kendala yang ada dilapangan, dilapangan seperti apa, implementasi kebijakan pasti kita lihat dari yang merasakan kan, yang menerima bantuan dan pelaksana dilapangan” **(Informan 1 (satu) Sebagai KASI Jaminan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Subang, pada 21 Juli 2022, pukul 13.00 WIB)”**



Mendukung pernyataan informan 1 (satu) bahwa pelaksanaan monitoring oleh PPKH. Berikut hasil wawancara dengan informan 4 (empat) dimana menanggapi monitoring stakeholder dalam implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Informan 4 (empat) menyatakan bahwa monitoring dilaksanakan oleh PPKH sudah berjalan dengan baik..

Dari penjelasan mengenai monitoring dalam implementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, menurut informan 1 (satu), menyatakan bahwa monitoring dilaksanakan seperti pembinaan oleh PPKH sebagai bentuk monitoring.

#### **4.2.2.6 Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik**

Menurut van metter dan van Horn (2019: 142) hal yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana lingkungan eksternal membantu dalam keberhasilan kebijakan, lalu lingkungan sosial dan ekonomi yang menerima dengan adanya kebijakan tersebut, karena lingkungan eksternal ini harus kondusif agar suatu kinerja implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Kondisi sosial dalam implementasi kebijakann merupakan hal penting dalam pelaksanaan kebijakan, dimana kondisi sosial masyarakat menerima dengan adanya kebijakan tersebut, berikut terkait dukungan masyarakat mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 (empat) sebagai berikut.

**“masyarakat antusias dengan program PKH ini, tetapi karena dengan sistem baru pake KK dan KTP online kesadaran masyarakat masih kurang untuk mengubah, jadi banyak yang ga menerima” (Informan 4 (empat) Sebagai Pendamping PKH, pada 21 Juli 2022, pukul 10.00 WIB)**

Berdasarkan pernyataan infoman 4 (empat) menyatakan bahwa di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang masyarakat antusias dengan nadanya program bantuan, tetapi kondisi masyarakat sendiri dnegan pendataan PKH menggunakan KK dan KTP online, belum mendukung karena kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam memperbaiki adminsitasi kependudukannya.

Setiap pelaksanaan program memiliki tujuan untuk suatu permasalahan, PKH merupakan bantuan untuk para masyarakat yang mengalami kurangnya pendapatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 (satu), dan 2 (dua), dan 3 (tiga) mengenai mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Subang menurut informan 1 (satu) menyatakan bahwa sumber pendapatan masyarakat beragam tetapi sebagian besar dibidang pertanian, dan informan 2 (dua) menyatakan bahwa sumber pendapatan masyarakat pekerja lepas, penduduk yang banyak sehingga pendapat masyarakat juga beragam. Informan 3 (tiga) menyatakan hampir secara keseluruhan di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang sebagai buruh tani.

**Tabel 4.4 Keadaan Sosial dan Ekonomi Desa Bongas**

Kondisi Sosial dan Ekonomi	
▪ Jumlah KK Miskin	: 1.055 KK
▪ Permasalahan utama kemiskinan	: Tidak ada lapangan usaha
▪ Tingkat pendapatan perkapita per Bln	: 0 – Rp 500.000,-
▪ Tingkat – tingkat buruh tani mencapai	: 1.580 Orang 82 %

**Sumber : Perangkat Desa Tahun 2022**

Program Keluarga Harapan (PKH) yang di laksanakan karena ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, pemerintah dengan adanya program mengharapkan masyarakat dapat merasa terbantu. Berikut wawancara mengenai ekonomi masyarakat dengan adanya Implementasi Program keluarga Harapan (PKH) dengan informan 2 (dua), dan 3 (tiga) sebagai berikut.

“dengan adanya program ini tingkat perekonomian terbantu, kalau untuk meningkat mah kan mereka bukan buat modal ya, rata-rata untuk kebutuhan sehari-hari aja”(Informan 2 (dua)  
**Sebagai KASI Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pamanukan,  
 pada 20 Juli 2022, pukul 10.00 WIB)**

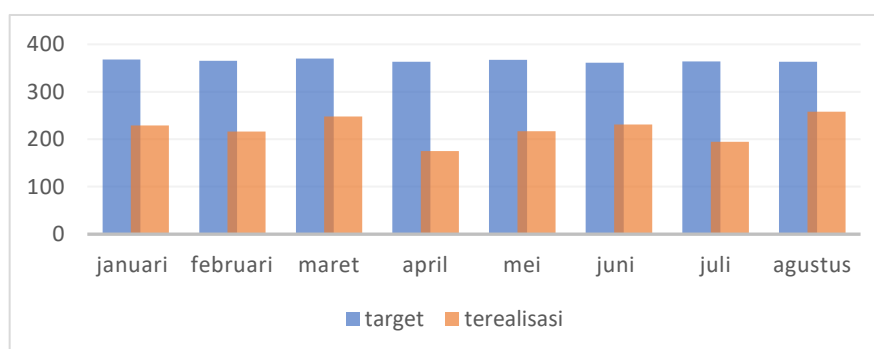
Mendukung wawancara informan 2 (dua), selanjutnya hasil wawancara dengan informan 3 (tiga) dimana menanggapi terkait ekonomi masyarakat dengan adanya

Implementasi Program keluarga Harapan (PKH) informan 3 (tiga) menyatakan bahwa secara subjektif jika melihat tingkat perekonomian masyarakat dengan adanya program ini terbantu. Mendukung pernyataan menurut informan 2 (dua), dan 3 (tiga)) mengenai perekonomian masyarakat dengan adanya kebijakan tersebut, menurut wawancara dengan Informan 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) menyatakan bahwa dengan adanya bantuan membantu perekonomian.

Selain ekonomi, tujuan dari program keluarga harapan (PKH) ini juga guna membantu masyarakat dibidang Pendidikan dan Kesehatan. Berikut wawancara mengenai Pendidikan, dan kesehatan masyarakat dengan adanya Implementasi Program keluarga Harapan (PKH) dengan informanm 4 (empat) di Desa Bongas sebagai berikut :

“kepekaannya terhadap Kesehatan dan pendidikannya itu sangat dominan kesitu apalagi menyekolahkan anaknya, terus posyandunya, kan inti dari PKH itu 3 sering ditonjolkan dan didominasinya Pendidikan, kesehatanya efek positif ketika sering kumpul itu ya itu ada perkembangan kaya gitu, walaupun kalau dilihat itu kurang begitu cepet ya percepatan itu, tapi ya haruslah dengan sabar didampingi, gitu aja” **(Informan 4 (empat) Sebagai Pendamping PKH, pada 21 Juli 2022, pukul 10.00 WIB)**

#### 4.5 Jumlah Kunjungan Balita Ke Posyandu



**Sumber : Ketua Kader Kesehatan Tahun 2022**

Dari penjelasan mengenai kesehatan masyarakat dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, Dalam hal ini dapat dilihat bahwa sudah setengah dari target

masyarakat memeriksakan anak balita ke posyandu di Desa Bongas, mengartikan bahwa sudah lebih dari 50% masyarakat peka terhadap kesehatan dapat dilihat dari kunjungan balita ke Posyandu, meskipun menurut pendamping juga masih terdapat KPM yang memang masih kurang kesadaran dalam memanfaatkan fasilitas yang diberikan untuk kesehatan balita ke posyandu.

Selain kesehatan, Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) ini juga diharapkan masyarakat dapat mengakses pendidikan di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) menurut hasil wawancara dengan informan 4 (empat) menyatakan bahwa kepekaannya terhadap pendidikannya itu sangat dominan, terlebih pada KPM mensekolahkan anak-anaknya.

**Tabel. 4.6 Jumlah Masyarakat Wajib belajar 9 tahun**



**Sumber : Perangkat Desa Tahun 2019-2021**

Jadi dalam hal ini bahwa tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tentang meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan bagi anak-anak dari rumah tangga sangat miskin (RTSM) sudah tercapai. Hal ini dilihat dari angka partisipasi sekolah dan minimnya angka anak putus sekolah di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang.

Dalam menjalankan kebijakan ini tidak akan dikatakan berhasil manakala lingkungan sekitar tidak memberikan dukungan, seperti dari Pemerintah Kabupaten

Subang itu sendiri. berikut hasil wawancara mengenai dukungan mengenai kebijakan tersebut sebagai berikut :

“kalau diliat dari keseluruhan pemerintahan subangnya itu dukungannya sangat baik, karena yang tadi saya bilang, dukungan walaupun belum maksimal 5% segala macam dalam bentuk anggaran itu sudah sejatinya dilaksanakan, insentifnya jalan terus untuk SDM PKH-nya, intinya untuk seluruh pemangku kebijakannya di Kabupaten Subang semua punya andil besar, tapi memang perlu lebih dioptimalkan lagi, jadi gacuma orang taunya PKH itu bantuan uang aja tanpa tau bahwa penerima PKH harus tau bagaimana mendidik anak, mengatur keuangan, dan sebagainya, masyarakat kurang tau tentang hal itu”(**Informan 1 (satu) Sebagai KASI Jaminan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Subang, pada 21 Juli 2022, pukul 13.00 WIB**)

Mendukung pernyataan informan 1 ( satu) dukungan pemerintah daerah Kabupaten Subang, hasil wawancara dengan informan 4 ( empat) sebagai berikut :

“pemerintah kabupaten subang telah memberikan dukungan intensif, tetapi dalam pelaksanaanya belum maksimal, tapi sudah ada, sudah dapat” (**Informan 4 (empat) Sebagai Pendamping PKH, pada 21 Juli 2022, pukul 10.00 WIB**)

Berdasarkan penjelasan dari Informan 1 ( satu) bahwa pelaksanaan PKH sedang mendapat dukungan baik dari pemerintah daerah Subang, seperti pemerintah daerah Subang memberikan insentif kepada pendamping PKH, mendukung pernyataan ini menurut informan 4 ( empat) bahwa memang pemberian insentif ini telah dilaksanakan meskipun belum maksimal tetapi sudah ada.